

PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK

Ari Ganjar Herdiansah
Kuntum Chairum Ummah¹
Sabar Simanjuntak²

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

email: ari.ganjar@unpad.ac.id

ABSTRAK

Sesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah. Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis yang menganalisis sejauh mana peran dan fungsi TNI AD dalam upaya perbantuan terhadap pemerintah dilakukan. Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang peran dan fungsi TNI AD dalam memberikan perbantuan terhadap pemerintah daerah yang mengambil studi di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kabupaten Lebak. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 bersama Perwira Siswa SESKOAD di mana pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap aparat komando kewilayahan Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok petani. Kajian ini menyimpulkan melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstansi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Kata Kunci: militer, pembinaan teritorial, TNI AD, pemerintah daerah

ABSTRACT

As stipulated by Act 32 of 2004 about Indonesian Armed Forces (TNI), the TNI has authority to conduct Military Operations Other Than War (OMSP). One of the tasks of it was Army assistance for local governments. However, although the law has been implemented more than a decade, there has been a little academic study that analyzes the extent to which the roles and functions of the army in the effort of assisting the government. This paper is the result of a study about the role and functions of the Army in providing a supporting local government that takes up research at the Unit for Regional Command (Satkowil) Lebak, Banten Province. The study was conducted in May 2016 where qualitative research approach carried through interviews to regional military commands in Lebak, local government, community leaders, youth organizations, and farmers' groups. The study concludes that with the implementation of the assistant task of the local government, the army is playing its role and function in driving the development

¹ Mahasiswa Pascasarjana Prodi Sosiologi, Universitas Padjadjaran, Indonesia, email: chairumummah@yahoo.com

² Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Indonesia, email: simanjuntak_sosiologi@yahoo.com

process in the area that correlated with the fulfillment of the various public interest. However, the optimization needs to be done to achieve maximum results with expanding institutional cooperation, especially between Satkowil Lebak and local government of Lebak.

Keywords: *military, territorial development, Indonesian Army, local government*

PENDAHULUAN

Dalam konteks kemiliteran di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang TNI terkait dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tiap-tiap Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) diberikan tugas yang salah satunya adalah perbantuan terhadap pemerintah daerah. Tugas tersebut dilakukan melalui Pembinaan Teritorial (Binter), yakni upaya pengelolaan pertahanan di daerah melalui pendekatan atau metode pembinaan dari aspek komunikasi sosial, ketahanan wilayah, dan bakti TNI. Melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap pemda, Satkowil memainkan perannya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkorelasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Pada umumnya, masyarakat menilai keberadaan berbagai satuan teritorial Angkatan Darat di lingkungan mereka bermanfaat untuk menciptakan stabilitas keamanan. Keberadaan institusi teritorial juga berperan dalam menengahi berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan yang terkadang sulit disatukan dan acapkali menimbulkan pergesekan sosial. Karena itu secara sosiologis,

TNI telah berupaya melakukan restrukturisasi fungsi di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan memposisikan diri sebagai pihak yang turut menciptakan keteraturan sosial.

Satkowil merupakan perwujudan dari sistem komando teritorial yang memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa perang merebut kemerdekaan dan melahirkan strategi pertahanan. Tujuannya yaitu mencapai perlindungan teritorial, kedaulatan, dan keselamatan bangsa. Awalnya, strategi pertahanan teritorial digunakan untuk strategi perang gerilya dalam menghadapi kolonialisme Belanda dimana dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, strategi yang digunakan dengan menyusun hierarki militer paralel dengan birokrasi pemerintahan sipil. Dalam perang gerilya TNI-AD sebagai tulang punggung menghadapi kolonialisme karena pada saat itu pesawat tempur TNI-AU masih sangat minim jumlahnya, sedangkan TNI-AL masih belum terbentuk dengan baik. Komando teritorial merupakan bentuk pemerintahan darurat militer yang mencerminkan fungsi

pertahanan dan kemudian dinamakan “Tentara dan Teritorium” sebagai akar dari Komando Daerah Militer (Kodam) untuk mengelola sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan (Widjojo, 2007).

Konsep komando teritorial diteruskan di era pasca kemerdekaan dengan alasan masih terdapat ancaman terhadap negara khususnya ancaman terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berawal konsep “Jalan Tengah” dan doktrin “Tri Ubaya Cakti” yang melegitimasi Dwifungsi ABRI bahwasanya militer memiliki tiga tugas utama yaitu pertahanan darat nasional, doktrin kekaryaan dan doktrin pembinaan. Komando teritorial dalam konteks Binter merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishanta) yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu segenap potensi wilayah untuk kepentingan pertahanan yang merupakan fungsi pembinaan teritorial (Binter) TNI (Adiwijoyo, 2002).

Keberadaan komando teritorial TNI AD dianggap berperan penting dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial politik yang memberikan kemudahan dalam menghadapi konflik eksternal dan internal, menjamin terjalannya hukum, tatanan dan kontrol politik, perbantuan bencana, dan penanganan terorisme. Mengingat besarnya nilai

guna Satkowil TNI AD di tengah-tengah masyarakat, tugas perbantuan terhadap pemerintah kemudian dicantumkan dalam skema OMSP. Diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan TNI AD dalam rangka mengakselerasi pencapaian tujuan dari program-program pemerintah. Salah satu contohnya ialah program ketahanan pangan dan swasembada pangan, di mana kerja sama telah dicanangkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementrian Pertanian dengan TNI AD. Beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan atas peningkatan produksi pangan dengan peran serta Satkowil TNI AD, antara lain Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Banten.

Namun demikian, kajian-kajian tentang bagaimana peran Satkowil TNI AD dalam melakukan perbantuan kepada pemerintah daerah terutama dalam menopang pencapaian program-program pemerintah belum banyak dilakukan. Padahal tugas perbantuan pemerintah daerah merupakan suatu topik yang menarik untuk dikaji sebab tidak lazim bagi institusi pertahanan memainkan peran aktif di ranah publik dan pemerintahan. Namun, produk konstitusional yang berlaku di Indonesia memungkinkan TNI AD untuk bersama-sama menyukseskan program pembangunan. Beberapa di antaranya adalah Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI/POLRI, yang

menegaskan dan mengatur tentang Jati Diri dan Peran TNI, Susunan dan Kedudukan TNI serta Tugas Bantuan dan Keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan Negara, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal 10 dan 11 diatur tentang peran, tugas, kedudukan dan pengerahan TNI, dan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Semuanya menegaskan bahwa seluruh tugas pokok TNI dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Oleh karena itu, fungsional atau disfungsional TNI bagi negara sangat bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara dalam memposisikan dan mengoperasionalkan TNI sebagai pengguna kekuasaan militer.

Dalam upaya penelaahan peran dan fungsi Satkowil TNI AD dalam bidang perbantuan program pemerintah daerah, penelitian ini dilakukan di wilayah Kodim Lebak Banten. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 bersama-sama dengan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Terdapat lima aspek perbantuan Satkowil TNI AD yang dikaji, yakni kebencanaan, bela negara, ketahanan pangan, infrastruktur, dan sinergi Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Satkowil Lebak dijadikan unit analisis karena memiliki keberhasilan dalam membantu ketahanan pangan.

Komandan Kodim Lebak menerima penghargaan sebagai Kodim terbaik dalam melaksanakan program ketahanan pangan kerja sama TNI AD dengan pemerintah se-Indonesia. Karakteristik geografis wilayah Lebak yang rentan terhadap bencana alam terutama banjir dan longsor juga menjadi perhatian dalam menganalisis peran Satkowil Lebak di bidang penanggulangan bencana. Masih banyaknya wilayah pedalaman yang sulit diakses menjadikan Lebak sebagai lokasi pelatihan bagi kelompok teroris, sehingga terdapat ancaman keamanan yang perlu diatasi oleh Kodim Lebak. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur Satkowil Kabupaten Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok petani.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui penggunaan kekuasaan militer dalam konteks demokrasi yang dimaknai dari peran dan fungsinya dalam pembangunan. Menurut Desch (1995), stabilitas keamanan perlu diperkuat dengan membangun kemitraan (*partnership*) secara sejajar antara sipil dengan militer sesuai dengan kompetensi masing-masing yang menekankan pada kinerja (*performance*) dalam sistem kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan. Namun, posisi militer

tidaklah dapat digunakan sebagai penjaga rezim suatu pemerintahan karena rentan akan penyalahgunaan fungsinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memiliki kekuasaan.

Perbantuan TNI AD terhadap pemerintah bersesuaian dengan menempatkan sipil di atas militer. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Huntington, 2013), kontrol sipil terhadap militer dapat terjadi melalui tiga pola yaitu kontrol sipil oleh lembaga pemerintah, kontrol sipil oleh kelas sosial, dan kontrol sipil oleh bentuk konstitusional. Upaya perbantuan terhadap pemerintah oleh TNI AD merupakan bentuk kontrol sipil yang konstitusional. Demikian pula dengan Berlin (2009) menyatakan bahwa menempatkan militer sebagai penopang pembangunan tidak menyalahi kontrol sipil atas militer selama menempatkan otoritas sipil pada kedudukan yang lebih tinggi daripada militer dalam upaya demokratisasi. Edmonds (1990) sependapat dengan konsep tersebut, baginya keistimewaan militer dalam menggunakan pengaruhnya dapat dipergunakan sebagai pendukung menciptakan stabilitas pembangunan. Akan tetapi, pengaruh tersebut harus tetap dibatasi dalam kerangka penopang pembangunan dan tidak mengarah pada upaya yang dapat mengganggu kontrol sipil (Huntington, 2003).

Dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam

perbantuan pemerintah, TNI AD menunjukkan sikap profesional karena senantiasa siaga melaksanakan setiap kehendak kelompok sipil yang memegang otoritas yang sah. Profesional TNI AD merupakan wujud nyata dari komitmen fundamental untuk menjadi pengawal kedaulatan negara dan penjamin integritas bangsa serta memiliki kompetensi dan etika yang tinggi di bidang militer (Syahnakri, 2008). Namun, peran militer dalam menopang pembangunan juga dilihat dalam konteks pelaksana kebijakan yang diambil oleh negara, bukan bagian dari komponen yang turut terlibat dalam semua penentuan kebijakan yang mengandung implikasi bagi soal pertahanan dan keamanan (Bainus, 2012). Dengan pengaruh dan kekuatannya, militer melakukan operasi di lapangan berdasarkan doktrin militer yang dimiliki, pengalaman, dan kompetensi yang memang secara profesional sudah dimiliki oleh militer yang seluruh peraturan yang digunakan akan disesuaikan dengan keputusan kaum sipil (Sutoro, 2002).

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak terletak di Provinsi Banten dengan luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 Km²), terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan. Keadaan tanah di Kabupaten Lebak pada umumnya

subur sehingga potensial dalam bidang pertanian. Tetapi di beberapa tempat terutama di daerah dengan kemiringan lebih dari 50 persen, penggarapan tanah tidak sesuai dengan tata guna yang seharusnya, sehingga terjadi sering erosi yang mengancam kesuburan tanah dan dapat menimbulkan terjadinya pelumpuran di sungai, bencana banjir serta tanah kritis. Pemanfaatan tanah untuk pertanian dan hutan semakin sempit akibat perkembangan penduduk, industri, perumahan, dan perkantoran. Di sebelah barat, Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang, di utara dengan Kabupaten Serang, dan di timur dengan Kabupaten Bogor. Sementara pada bagian selatan terhadap kawasan pantai dan laut yang berbatasan dengan Australia.

Topografi Kabupaten Lebak terdiri dari banyak pegunungan dan perbukitan sehingga terdapat lokasi-lokasi yang sulit untuk diakses, terutama di daerah bagian selatan seperti Kecamatan Malingping dan Kecamatan Bajah. Di lokasi-lokasi yang terpencil rawan akan masalah keamanan. Beberapa kelompok teroris telah teridentifikasi menjadikan lokasi-lokasi terpencil sebagai tempat untuk pelatihan. Di bagian selatan, terdapat pantai yang terbuka pada laut lepas dan perbatasan laut dengan Australia. Kondisi tersebut meningkatkan faktor ancaman keamanan nasional, karena apabila sistem pengawasan

lemah daerah-daerah tersebut dapat dijadikan pintu masuk bagi pihak-pihak yang bermaksud mengganggu keamanan dan pertahanan negara. Tipe topografi pegunungan dan perbukitan juga meningkatkan risiko bencana alam. Ditambah kondisi infrastruktur yang masih belum memadai, para petugas penanggulangan bencana seringkali kesulitan mengakses lokasi terjadinya bencana. Karena itu, peranan Satkowil TNI AD di Lebak sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah daerah maupun warga setempat. Dengan keterampilan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satkowil Lebak, pemerintah dan warga dapat terbantu dalam berbagai hal seperti penanggulangan bencana, ketahanan pangan, bela negara. Dalam konteks keamanan nasional, Satkowil Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan dapat bersinergi dalam menata ruang pertahanan agar mampu menangkal ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

2. Upaya Perbantuan TNI AD di Bidang Penanganan Kebencanaan

Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang tinggi, curah hujan terbesar berada di bagian timur sedangkan terkecil berada di bagian utara. Pembangunan dan peralihan fungsi lahan telah mengurangi jumlah luas resapan air hujan secara alami ke dalam tanah. Hujan yang

turun deras ke permukaan kedap air akan meningkatkan limpahan ke sungai yang kapasitasnya terbatas, sehingga banjir meluap ke jalan-jalan dan permukiman. Aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Lebak bersama anak-anak sungainya membentuk pola daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang dan Sungai Cisimeut. Kedua, DAS Ciliman dan Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisihih, Sungai Cihera, Sungai Cipager dan Sungai Cibaliung.

Pada tahun 2013, banjir menerjang Kecamatan Banjarsari dengan ketinggian 30 cm s/d 100 m. Banjir ini mengakibatkan terendahnya kurang lebih 1.005 rumah yang tersebar di Desa Keusik sebanyak 405 Kepala Keluarga (KK) menderita, Cilegong Hilir 257 KK, Desa Ciruji, 127 KK, Desa CibaturKeusik 10 KK, Desa Cidahu, 13 KK, Desa Laban Jaya 30 KK, Desa Umbul Jaya 64 KK, dan sisanya tersebar di Desa Lebak Keusik dan BojongJuruh. Ditahun yang sama, tanah Longsor terjadi di Kecamatan Cibadak, Panggarangan, Cibeber, Leuwidamar, Cilograng, Kalanganyar, Rangkasbitung dan Lebak Gedong. Jumlah kerusakan akibat tanah longsor tersebut 86 rumah rusak dengan kategori, 50

rusak total, 25 rusak berat dan 11 rusak sedang. Longsor ini terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi. Pada Bulan April 2013 bencana tanah longsor terjadi di Kampung Cangkeuteuk Dusun. Pasirnangka kecamatan Muncang. Mengakibatkan 7 rumah rusak total, 14 rumah rusak ringan, 3 orang terluka dan 20 rumah terancam.

Dalam rangka penanggulangan bencana di kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak telah memiliki RTRW Kabupaten Lebak (RTRW Kabupaten Lebak 2012-2032) yang Bermitigasi Bencana. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui BPBD Kabupaten Lebak telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas diantaranya: membuat peta dan kajian daerah rawan bencana, penyuluhan dan sosialisasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat diantaranya pembentukan desa tangguh, kegiatan simulasi tsunami dengan masyarakat pesisir, dan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

Upaya Satkowil Lebak dalam peningkatan kapasitas dalam rangka penanggulangan bencana di

Kabupaten Lebak dilakukan melalui kerja sama dengan BPBD Kabupaten Lebak, lembaga/Instansi pemerintah, dan pihak swasta melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain Geladi Posko-1 Golok Sakti XV Kodim 0603/LBK, pelatihan mitigasi bencana yang digelar divisi pengurangan risiko bencana atau Disaster Management Center (DMC) Dompot Dhuafa di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Muara Kecamatan Wanasalam, pelatihan pertolongan pertama dan ambulance, melakukan penghijauan dengan menyebarkan empat juta bibit tanaman untuk pelestarian lingkungan hutan dan lahan, dan pendidikan dan latihan dokter kecil.

Selain upaya di atas, aparat Kodim Lebak terlibat dalam penyelamatan evakuasi kepada masyarakat yang terjebak banjir dan pelaksanaan bantuan penanganan banjir. Mereka bekerja sama dengan BPBD dan seluruh komponen masyarakat, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PMI, dan Dinas Kesehatan setempat. Satkowil Lebak juga mendirikan posko-posko bencana banjir untuk melayani masyarakat yang terkena bencana alam. Di setiap Komandan Rayon Militer (Koramil) didirikan posko di daerah yang terkena banjir dan longsor dengan

pengerahan sejumlah 388 personel untuk membantu menangani bencana banjir di wilayah Kabupaten Lebak. Atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Satkowil Lebak, baik aparat pemerintah maupun masyarakat merasakan manfaatnya. Apalagi, personel TNI senantiasa hadir paling awal ketika terjadi bencana banjir.

3. Upaya Perbantuan TNI AD di Bidang Infrastruktur

Upaya perbantuan TNI AD di bidang infrastruktur sudah menjadi program rutin. Namun melakukan optimalisasi setelah berlaku arahan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) terkait peningkatan peran Kodim 00603/Lebak kepada Pemerintah Kabupaten Lebak dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur melalui program Bhakti TNI dan kegiatan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat. Peran Kodim sangat membantu pemerintah dalam menginventarisasi infrastruktur yang rusak di wilayah binaannya, baik karena akibat bencana alam, maupun karena usia sarana infrastruktur. Tingkat koordinasi berupa kerja sama dengan Dinas Bina Marga membahas tentang pemilihan lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan usulan program tersebut Pemda menyiapkan anggaran sesuai kemampuan dengan menambahkan kegiatan berupa *jambanisasi*, renovasi rumah tidak

layak huni, pembangunan tempat ibadah, serta penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat seperti kesehatan, bela negara, dan pendidikan.

Pemberdayaan Babinsa memberikan kontribusi besar karena mereka berada di garda depan yang bersentuhan langsung dengan wilayah dan masyarakat. Pemerintah daerah merasa terbantu mengingat keterbatasan infrastruktur di kabupaten Lebak. Babinsa selain menginventarisir kerusakan infrastruktur juga mampu memberikan motivasi serta jalan keluar bagi keluhan masyarakat, kerusakan jembatan yang besar mencapai angka 1000 lebih telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas dimana dengan jumlah kerusakan yang begitu banyak pemda hanya mampu menganggarkan perbaikan jembatan sebanyak 20-30 buah. Butuh waktu lama untuk benar-benar dapat mengatasi masalah putus/rusaknya jembatan di beberapa daerah tersebut. Bahkan jembatan yang ke-1000 selesai dibangun tidak menutup kemungkinan jembatan yang dibangun sebelumnya telah mengalami penurunan kualitas akibat dimakan usia.

Dampak lainnya bagi masyarakat berupa lambatnya pertumbuhan ekonomi karena terganggunya arus transportasi, sehingga barang-barang kebutuhan pokok naik karena ongkos yang

tinggi. Dalam bidang pendidikan, anak-anak akan mengalami hambatan untuk pergi ke sekolah dan mengikuti pelajaran terlebih pada musim penghujan. Bidang sosial budaya, perkembangan masyarakat pedesaan juga mengalami kemandekan karena desa terisolir sehingga akses keluar masuk sangat minim.

Dari hasil wawancara diperoleh masukan setiap program yang diajukan Kodim selalu mendapat respon positif dari pemda namun belum ditindak lanjuti secara tertulis berupa *MoU* sehingga hal tersebut tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini dapat disikapi ketika terjadi pergantian pejabat baik Satkowil maupun dinas bina marga. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi pejabat baru dimana akan melaksanakan koordinasi ulang dengan instansi terkait, sementara program yang sudah dijalankan sebelumnya berjalan secara bertahap yang butuh penyelesaian lebih lanjut. Agar program yang telah berjalan dapat dilanjutkan secara efektif kerjasama antara Satkowil dengan dinas bina marga seharusnya dipermanenkan dengan *MoU*. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah terbatas hal ini dapat disikapi dengan penerapan proyek padat karya dengan melibatkan peran aktif Babinsa dan masyarakat.

Selain analisis terhadap pelibatan instansi terkait, penting juga mengevaluasi kerjasama dan

dukungan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program. Bentuk dukungan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak membutuhkan sinergi antara instansi terkait baik yang berada dalam koordinasi pemerintah daerah, Satkowil dan Polres setempat. Hal ini dilakukan untuk menjalankan fungsi masing-masing sehingga tidak terjadi benturan di lapangan. Rencana umum tata ruang (RUTR) dari ketiga komponen tersebut tentu dengan tugas dan tanggung jawab memiliki berbagai perbedaan. Namun selama masih dapat di koordinasikan dengan baik maka tidak menjadi persoalan. Satkowil dengan tugas pokoknya adalah pembinaan teritorial untuk menyiapkan RAK (ruang, alat dan kondisi juang) wilayah pertahanan tentu keberadaan infrastruktur memiliki nilai strategis yang tidak bisa dipandang sepele. Di lain pihak, Polres juga dengan program yang telah ditetapkan komando atasannya tentu memiliki tugas yang berbeda. Polres sebagai penanggung jawab keamanan, dan ketertiban masyarakat juga memiliki peluang yang sama untuk menikmati pentingnya tersedianya infrastruktur. Pemerintah daerah demikian juga sebagai induk dari penanggung jawab Kabupaten Lebak memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dan strategis dalam melayani, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Lebak.

Namun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pada bidang infrastruktur kendala pembangunan infrastruktur di kabupaten Lebak dengan luasnya wilayah dan kondisi medan yang bervariasi (pegunungan dan sungai) menyebabkan terhambatnya Babinsa dalam menjalankan pembinaan wilayah. Terbukanya akses jalan/jembatan di daerah terpencil secara otomatis akan berdampak langsung terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat, dimana hasil pertanian masyarakat dapat terdistribusi dengan baik.

4. Upaya Perbantuan TNI AD di Bidang Ketahanan Pangan

Program ketahanan pangan dan swasembada pangan merupakan program kerja sama yang telah dicanangkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Pertanian dengan TNI AD sejak 2012. Beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan atas peningkatan produksi pangan dengan peran serta Satkowil TNI AD, antara lain Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Banten. Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Lebak didukung adanya *MoU* antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kodim. Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) turut berperan serta dalam pengamanan pupuk dan distribusi pupuk. Apkowil turun langsung untuk mengawal

proses kegiatan pertanian dari awal hingga akhir. Masyarakat menerima kehadiran Babinsa dan menganggap bahwa Babinsa banyak membantu terutama dalam mengorganisir kelompok-kelompok tani yang ada di tiap desa. Babinsa juga berperan sebagai pendorong dan pengorganisir kegiatan bercocok tanam. Dengan pengorganisasian yang dilakukan oleh para Babinsa, maka saat ini proses penanaman para petani cenderung akan serempak pada setiap musim tanam. Keseragaman penanaman ini akan memaksimalkan hasil tani karena mengurangi kemungkinan serangan hama. Selain itu, Koramil menyediakan informasi yang diperlukan di daerah, seperti “angka tanam” dan penyambung komunikasi antara daerah dengan Dinas Pertanian. Selain melibatkan Apkowil, Pemda juga meningkatkan program Ketahanan Pangan dengan melibatkan petugas-petugas pertanian. Bahkan, kedepan akan lebih baik lagi karena akan ada Mantri Pertanian di setiap desa, sesuai dengan perintah Bupati. Saat ini pun para Babinsa yang mendampingi para petani telah mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan dari berbagai pihak, agar dapat menunjang tugas-tugasnya dalam mengawal program ketahanan pangan dan mendampingi para petani.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Dinas Pertanian, Babinsa dan Gabungan

Kelompok Petani (Gapoktan), peran Bulog juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para petani sering terlambat menerima informasi tentang penerimaan gabah. Selain itu, standar mutu gabah yang dikeluarkan oleh Bulog pun dianggap memberatkan petani karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjemur gabah agar dapat mencapai 14 persen kadar air. Di samping itu, terbatasnya kemampuan gudang penyimpanan Bulog membuat kemampuan Bulog pun kurang maksimal untuk menyerap hasil panen para petani. Hal lain yang juga menjadi kendala penjualan hasil panen kepada Bulog adalah sarana infrastruktur yang kurang baik di beberapa daerah yang mengakibatkan para petani terpaksa menjual hasil panen nya ke tengkulak dengan sistem ijon karena mengalami kesulitan untuk membawa hasil panen nya ke Bulog. Para petani yang mengalami kesulitan modal juga lebih memilih menjual hasil panen nya ke tengkulak dengan sistem ijon agar dapat segera mendapatkan hasil yang akan dipergunakan untuk membiayai proses pada musim tanam selanjutnya.

Kondisi di atas selain berdampak pada kurangnya daya serap pemerintah terhadap hasil pertanian para petani, juga membuat penghasilan para petani pun kurang optimal. Kendala dalam pengembangan hasil produksi

tanaman jagung dan kedelai masih rendah, dikarenakan terbatasnya penanganan pasca panen dan pemasaran bagi produk-produk hasil pertanian tersebut sehingga menurunkan minat petani untuk menanamnya. Di samping itu, kurangnya kapasitas dan kinerja tenaga penyuluh bidang pertanian karena keterbatasan tenaga penyuluh dan tempat tinggal penyuluh yang berjauhan dengan lokasi petani yang menjadi tanggung jawabnya turut berdampak terhadap efektivitas program Ketahanan Pangan. Karena itu, peluang bagi program Ketahanan Pangan yang dilakukan antara lain adanya evaluasi rutin oleh Dinas Pertanian yang dilaksanakan setiap bulan. Rapat-rapat koordinasi untuk evaluasi dengan instansi terkait termasuk Babinsa dan Kodim yang dilaksanakan setiap triwulan juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas program ketahanan pangan di kabupaten Lebak.

Pada bidang ketahanan pangan, peran aparat komando kewilayahan Kodim Lebak, sudah berjalan dengan maksimal. Para Babinsa dapat menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan program ketahanan pangan, mulai dari pendistribusian bibit dan pupuk, mengorganisir dan menggerakkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), memberikan penyuluhan, hingga kegiatan-kegiatan pasca panen. Keberhasilan

Satkowil Lebak dalam menjalankan program ketahanan pangan menandakan bahwa unit TNI AD di daerah mampu mengoptimalkan keleluasaan OMSP sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mana salah satunya ialah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah.

5. Upaya TNI AD Membangun Bela Negara

Pembinaan bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara seperti yang tercantum pada UUD 1945 pasal 30. Pembinaan teritorial secara konkrit merupakan kegiatan perbantuan dalam menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara dimana upaya mewujudkan dukungan rakyat kepada TNI untuk mempertahankan negara dilakukan dengan tidak mencampuri urusan politik praktis, tidak mencampuri proses hukum dan tetap tunduk pada keputusan politik negara. Pada Wilayah kabupaten Lebak, kegiatan pembinaan bela negara sudah dilaksanakan oleh Kodim yang bersinergi dengan pemerintah daerah. Kodim melaksanakan kegiatan Bela Negara melalui kegiatan-kegiatan pembinaan ketahanan wilayah, Komunikasi Sosial, dan Bhakti TNI seperti kegiatan pelatihan Linmas, pembekalan Bela negara kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh

pemuda yang diselenggarakan di Kodim maupun kegiatan atas permintaan dari elemen masyarakat lainnya atau Instansi pemerintah lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak turut serta mendukung kegiatan Bela Negara melalui dukungan anggaran yang turun ke Kesatuan Pembangunan Lingkungan Masyarakat (Kesbanglinmas), dimana pelaksanaan kegiatan Bela Negara bekerjasama dengan Kodim.

Kodim 0603/Lebak memiliki 15 koramil dan 6 Posramil serta 280 Babinsa. Dihadapkan dengan luas daerah binaan yang meliputi 28 kecamatan, 5 kelurahan dan 340 desa, sehingga berdasarkan data diatas, personel Babinsa masih ada yang memiliki tanggung jawab desa binaan lebih dari satu. Dengan wilayah binaan yang cukup luas tersebut, menyebabkan pembinaan desa yang dilakukan oleh babinsa belum optimal, idealnya satu babinsa membina satu desa, sehingga kegiatan bela dapat lebih optimal dengan setiap hari senin babinsa menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah binaannya secara bergiliran, serta adanya pertemuan rutin untuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama tingkat koramil. Pada tingkat Babinsa, kegiatan bela negara dirasakan peran unsur pemerintahan desa kesadaran dan partisipasinya masih kurang dalam kegiatan pembinaan bela negara. Hal ini terlihat dari belum

adanya sinergi antara Babinsa dan pemerintahan desa dalam hal kegiatan bela negara, dimana pemerintahan desa beranggapan bahwa pelaksanaan kegiatan bela negara merupakan hanya tanggung jawab Babinsa, sehingga wawasan kebangsaan di desa dalam bela negara masih tergolong cukup rendah.

Pembinaan bela negara di perguruan tinggi di Kabupaten Lebak sangat penting dilakukan, mengingat mahasiswa merupakan kaum intelektual yang memiliki peran nyata dalam perkembangan sosial masyarakat melalui civitas akademika, Kegiatan bela negara yang dilakukan Kodim 0603/Lebak di perguruan tinggi walaupun sudah dilaksanakan namun masih perlu ditingkatkan, dimana kegiatan kodim 0603/Lebak selama ini di perguruan tinggi sudah dilaksanakan dalam bentuk memenuhi mengundang mahasiswa dalam ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan program pembinaan teritorial kodim 0603/Lebak berupa kegiatan pembekalan bela negara di Makodim, namun masih terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum mendapat pembekalan bela negara, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan bahwa mahasiswa (BEM) perguruan tinggi STKIP menyarankan mohon dapatnya agar Kodim dapat memberikan pembekalan/penyuluhan bela negara kepada mahasiswa di kampus,

sehingga mahasiswa lebih memahami tentang bela negara serta ancaman, gangguan maupun hambatan dalam kaitan dengan pembangunan pertahanan negara, dengan demikian jumlah mahasiswa yang ikut dalam kegiatan bela negara tentunya akan lebih banyak.

Pembinaan bela negara dan penanaman wawasan kebangsaan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab babinsa, agar pelaksanaan tugas babinsa di lapangan dapat berhasil dengan baik maka Babinsa sangat perlu menguasai daerah binaan (bidang geografi, demografi dan kondisi sosial), dihadapkan dengan beban tugas yang kompleks ini babinsa perlu mengedepankan skala prioritas dalam pelaksanaan, salah satu skala prioritas tersebut adalah membangun komunikasi dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara masyarakat daerah binaannya. Pembinaan bela negara yang telah berjalan di Wilayah Kabupaten Lebak mendapat respon yang positif dari masyarakat, sekolah-sekolah, instansi pemerintah, serta stake holder yang terkait, hal ini ditunjukkan dengan adanya permintaan dari berbagai instansi baik pemerintah, lembaga pendidikan maupun swasta kepada Kodim untuk mengirimkan personelnnya dalam rangka memberikan pembekalan bela negara.

Peningkatan pendidikan juga perlu diupayakan demi membuka wawasan masyarakat sehingga memudahkan Babinsa dalam menanamkan nilai-nilai bela negara. Kondisi ini sangat penting untuk menangkal setiap munculnya berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar. Antusiasme masyarakat Kabupaten Lebak terhadap kegiatan bela negara cukup tinggi, sehingga hal merupakan suatu peluang dan kesempatan dalam meningkatkan pembinaan bela negara dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia dalam bidang pertahanan. Kodim dan Pemerintah Kabupaten Lebak sudah melaksanakan bela negara dengan maksimal, namun pada level Babinsa peran unsur pemerintahan desa dirasakan kesadaran dan partisipasinya masih kurang dalam kegiatan pembinaan bela negara. Kegiatan pembekalan/penyuluhan bela negara di tingkat perguruan tinggi perlu ditingkatkan agar sasaran mahasiswa lebih banyak memahami tentang bela negara, guna meningkatkan kesadaran bela negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional.

6. Upaya Sinergi RTRW Pertahanan dan RUTR Pemerintahan Daerah

Kabupaten Lebak juga menjadi sebagai salah satu Daerah Otonom di Wilayah Provinsi Banten yang memiliki berbagai potensi

sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Daerah Lebak memiliki wilayah yang luas, yang bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Luas wilayah Kabupaten Lebak memungkinkan dilakukan pengembangan pembangunan, namun memiliki kontur medan yang tergolong berat karena berbukit-bukit dan batu karang. Posisi Lebak memiliki wilayah yang berbatasan dengan wilayah provinsi dan kabupaten lain, yang rawan terhadap kriminalitas (penyelundupan, curanmor, narkoba, dan fanatisme agama). Selain itu, wilayah maritim yang cukup luas serta hasil laut yang cukup banyak oleh ikanlautnya juga cenderung belum dapat diawasi secara maksimal. Potensi kendala lain yang berpeluang menjadi ancaman dalam Rencana Tata Ruang adalah adanya pembangunan pemukiman dan perindustrian di wilayah Kabupaten Lebak. Rencana pembangunan Koramil-koramil baru mendapatkan dukungan dari Pemda. Bahkan Pemda berharap agar ada Koramil di setiap Kecamatan. Pos-pos militer yang ada selama ini dapat dikembangkan untuk menjadi Koramil dan akan mendapatkan dukungan Pemda berupa lahan. Demikian pula dengan rencana pembangunan Kompi Senapan. Pemda sangat mendukung adanya

kekuatan militer yang diharapkan dapat membantu pengawasan wilayah perbatasan dan pantai di wilayah Selatan Lebak. Dukungan Pemda akan diwujudkan dengan penyediaan lahan di Kamp Cilograng guna lokasi pembangunan Kompi Senapan.

Peningkatan aktivitas pembangunan perumahan yang telah digelar membutuhkan ruang yang semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara signifikan. Pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka panjang. Diantara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman, perkantoran, perindustrian, pusat-pusat perdagangan (*central business district*) dan lainnya. Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, yang menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara tata air, pengendali perubahan iklim mikro dan sebagainya.

Perubahan fungsi ruang kawasan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya pencemaran, kemacetan,

hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan sebagainya. Pemanfaatan sumberdaya ruang juga dapat memicu terjadinya kriminalitas yang semakin tinggi kapasitasnyaseperti munculnya kasus-kasus persengketaan batas wilayah pada berbagai daerah dan juga internasional. Hal tersebut seolah-olah menunjukkan adanya trade off antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Permasalahan konflik antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan semakin jelas terlihat dewasa ini pada hal dalam penataan ruang kebijakan-kebijakan telah mengakomodasi prinsip-prinsip utama menuju pembangunan berkelanjutan seperti prinsip-prinsip keterpaduan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Solusi-solusi yang dapat digunakan untuk melakukan harmonisasi pemanfaatan sumber daya alam, lahan dan perkembangan aspek sosial-ekonomi dalam penataan ruang. Pada dasarnya pengembangan wilayah adalah usaha pembangunan daerah yang memperhitungkan keterpaduan program sektoral seperti pertanian, pertambangan, aspirasi masyarakat dan potensi lain dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Dengan adanya beberapa masalah yang timbul terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta

berhubungan dengan tingkat kesadaran, pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah tentang fungsi lahan. Jika dihadapkan dengan rencana pembangunan pemukiman bagi warga yang bekerja di Jakarta, maka bisa saja menjadi ancaman terhadap kabupaten Lebak. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin cepat serta berpengaruh kepada pertahanan dan keamanan wilayah kabupaten Lebak.

Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam RUTR/RUTW adalah adanya komunikasi yang sinergis melalui kerjasama dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) antara Satkowil dengan Pemerintah kabupaten Lebak serta seluruh unsur masyarakat kabupaten Lebak. Pemda dapat mengakomodir hal-hal yang ditelaah di telaah dan disampaikan oleh Satkowil, seperti perlunya pembentukan Koramil-koramil baru dan pembangunan Kompi Senapan di wilayah Selatan Kabupaten Lebak. Dengan adanya saran dari masyarakat sekitar kecamatan Ciligrang, Cijagu, Cibeber, Curug Bitung, Sobang, Wanasalam serta adanya pertimbangan daerah keamanan yang di khawatirkan oleh masyarakat, maka pembentukan pos-pos militer di harapkan dijadikan menjadi Koramil yang memiliki kapasitas dalam menjangkau keamanan di kecamatan kabupaten

Lebak, Dari hasil beberapa wawancara baik kepada pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat, bahwa usulan untuk perubahan dari pos militer menjadi Koramil sangat memperoleh antusias, dukungan serta keinginan percepatan pembentukan koramil tersebut.

Realisasi pembentukan pos militer menjadi koramil maka RUTR/RTRW menjadikan sinergitas antara TNI, Pemda dan masyarakat akan memberikan dampak yang positif keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari situasi yang kondusif, situasi ini bisa terwujud bila masyarakat mempunyai ketangguhan, keuletan, dan ketahanan dari pengaruh-pengaruh negatif. Dimana hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode binter yang terencana, tepat dan terarah agar berhasil dan berdaya guna.

Rencana Pembangunan jalan Tol baru jurusan Jakarta-Lebak merupakan peluang dalam pengembangan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten Lebak. Begitu juga rencana pembangunan *double track* rel kereta api sebagai akses kemudahan dalam sarana transportasi masal untuk mendukung pengembangan pemukiman di wilayah Lebak bagian Utara sebagai perluasan pemukiman dari ibukota Jakarta yang mulai

padat. Permasalahan yang menjadi ancaman adalah perbatasan wilayah kabupaten Lebak sebelah selatan adalah Samudera India yang terbuka luas serta berbatasan langsung dengan negara lain terutama negara Australia, sehingga rentan terjadi penyusupan dan penyelundupan, baik itu berupa barang-barang ilegal maupun adanya pengungsi yang mencari suaka dari negara lainnya. Sedangkan meningkatnya pengembangan pembangunan perumahan dan pabrik industri di Wilayah kabupaten Lebak menjadi ancaman berkurangnya lahan pertanian yang dapat menurunkan hasil produksi pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan tersebut. Ancaman lainnya adalah rencana pembangunan pemukiman bagi warga yang berkerja di Jakarta namun mereka bertempat tinggal di sekitar luar kota Jakarta seperti kota Bekasi, Bogor, Tangerang dan Rangkasbitung. Hal ini terjadi karena ibukota Jakarta sudah begitu padat penduduknya dan semakin bertambah jumlahnya, sedangkan lahan untuk tempat tinggal penduduk Jakarta sudah sangat terbatas dan langka.

Upaya sinkronisasi RTRW Pertahanan dengan RTRW Pemda, penataan ruang saat ini belum dapat diwujudkan sesuai dengan kepentingan pertahanan, karena belum adanya sinkronisasi antara RTRW Pertahanan darat dan RTRW Pemerintah, bahkan sering

berbenturan dengan kepentingan pembangunan di daerah. Kepentingan-kepentingan pertahanan darat masih kurang terwadahi dan tidak terakomodasi dalam RTRW yang disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengatasi kendala tersebut ditentukan dengan adanya aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Komando Kewilayahan dan Pemerintah Daerah. Lemahnya pemberdayaan sistem, aspek kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia dan keterbatasan dukungan anggaran merupakan faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan RTRW pertahanan darat yang berdayaguna dan berdayasaing. Untuk mengatur tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai bagian dari sistem RTRW Nasional perlu dibuat RTRW pertahanan darat oleh jajaran Komando Kewilayahan dalam rangka merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta pada masa damai. Untuk merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan Sishanta diperlukan rencana tata ruang wilayah yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang disusun secara terpadu dan komprehensif. Karena itu, RUTR Pertahanan dan RTRW Pemda di Kabupaten Lebak perlu

disusun secara komprehensif dan terpadu melalui tahapan dialog diantara semua pemangku kepentingan, Pemerintah daerah Kabupaten Lebak dan TNI AD (Kodim 0603/Lebak) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya.

SIMPULAN

Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pembinaan teritorial TNI AD dalam upaya perbantuan pemerintah menopang terlaksananya program-program pemerintah daerah. Pada gilirannya, TNI AD memegang mandat sebagai pengguna instrumen kekerasan untuk mempertahankan negara dan rakyatnya serta turut berperan menciptakan stabilitas nasional dan pemenuhan kepentingan publik. Perlu digarisbawahi di sini bahwa peranan TNI AD dalam upaya perbantuan pemerintah daerah tidak menempatkan militer dalam tatanan kekuasaan. Upaya tersebut juga memperkuat posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan pasar dan mendukung optimalisasi kinerja pemerintah. Seperti yang tampak pada perbantuan Kodim Lebak di bidang kebencanaan, infrastruktur, ketahanan pangan, bela negara, dan bidang tata ruang yang bermanfaat bagi proses pembangunan di Kabupaten Lebak dan mengarah pada kondisi yang mendukung ketahanan nasional.

Namun, upaya perbantuan Satkowil Lebak terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak masih dapat ditingkatkan lagi antara lain dengan merumuskan *MoU* terutama di bidang kebencanaan supaya terdapat pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan peningkatan pemahaman aparat pemerintah daerah tentang pentingnya RUTR Pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijoyo, Suwarno. 2002. *Preventive Defense: Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Swadana Bangun Dinamika Dunia. h. 65.
- Bainus, Arry. 2012. *Mengatur Tentara*. Bandung: M63 Foundation dan Asosiasi Ilmu Politik (AIP) Bandung. h. 228.
- Berlin, David Pion. 2009. *Defense Organization and Civil Military in Latin America*. Armed Forces and Society. vol. 35, no.3, h. 535.
- Davis, L, Mohay, H & Edwards, H 2003, 'Mothers' involvement in caring for their premature infants: an historical overview', *Journal of Advanced Nursing*, vol. 42, no. 6, hh. 578–86.
- Desch, Michael. 1995. *Civilian Control of Military: The Changing Security Environment*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. h. 7
- Donelly, Chris. 2006. *Handbook of the Sociology of the Military*. New York: Springer Science and Business Media. h. 29
- Hall, M 1999, 'Breaking the silence: marginalization of registered nurses employed in nursing homes', *Contemporary Nurse*, vol. 8, no. 1, hh. 232-237.
- Huntington, Samuel. 2013. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer*. Jakarta: Grasindo. h. 4-7.
- Kardi, K. 2015. *Democratic Civil Military Relations*. Jakarta: Pratama. h. 155-158.
- Sutoro, E. 2002. *Meletakkan Militer pada Posisi yang Sebenarnya*. Jakarta.
- Syahnakri, K. 2008. *Aku Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas. h. 21
- Widjojo, A. 2007. *Komando Teritorial dalam Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi). h. 134-135
- Wijaya, K, Phillips, M & Syarif, H 2002, 'Pemilihan sistem penyimpanan data skala besar', *Jurnal Informatika Indonesia*, vol. 1, no. 3, hh. 132-140.